

## Langkah Politik Nggogesa Pasca Cawagub

Oleh Dr Nispul Khoiri

**Pasca mundurnya Nggogesa, di samping memberikan dinamika politik tersendiri bagi Golkar, juga memberikan ruang melakukan reinterpretasi politik**

**M**undurnya Nggogesa Sitepu sebagai Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara (Cawagub) cukup menarik untuk diikuti dan dianalisis. Dalam konstelasi politik Pilkada Sumatera Utara (Sumut) ini menjadi hal baru, seiring dengan pertanyaan dan analisis publik-pun beragam tafsir—meski ada yang menyalkan atau sebaliknya men-

Langkah politik diambil Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Sumut ini, secara politik dipandang sah saja, meski dengan berbagai alasan politik yang setuju atau tidak setuju harus dipahami oleh publik. Partai Golkar merupakan salah satu partai terbesar dan tertua di negeri ini, di samping pengalaman dan manajemen politik cukup matang dan mapan. Atas dasar itu pada konteks Pilkada Sumut, sejatinya Golkar lebih tepat menempati Cagub ketimbang Cawagub, terlepas siapapun pendampingnya. Kehormatan dan kewajiban selaku partai terbesar, tertua dan berpengalaman, seharusnya menjadi pikiran prioritas bagi kader Golkar. Terlebih pada ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut.

Karena Golkar memiliki daya tarik dan tempat tersendiri, berbeda dengan partai

lainnya. Artinya dengan mundurnya Nggogesa dari Cawagub dipandang bentuk pikiran strategis dan bijak melewatkan kembali marhabat dan kehormatan Golkar dan bukan menurunkan kelas Golkar itu sendiri. Dalam dunia politik, menjaga kewibawaan partai menjadi sebuah keistimewaan. Partai bagaikan rumah besar, semestinya membenarkan perlindungan, keaduan dan kenyamanan bagi pemiliknya atau siapa saja yang tinggal di dalamnya. Oleh karenanya rumah harus dirawat dijaga dengan sebaik-baiknya. Terlebih Golkar Sumut merupakan partai pemenang Pemilu legislatif (2014) rumah yang telah memberikan kenyamanan langsung dirasakan oleh rakyat di negeri ini.

Perolehan 17 kursi DPRD dan perolehan suara terbanyak pada Pemilu legislatif menjadi bukti nyata partai ini bagian dari kepemilikan rakyat. Sebaliknya keinginan rakyat juga pasti menginginkan munculnya kader-kader terbaik Golkar memimpin daerah ini menjadi lebih baik lagi. Realitas ini harus dilakukani pula dengan kepekaan dan kecerdasan Golkar mengadopsi kebutuhan masyarakat tersebut. Pasca mundurnya Nggogesa, di samping membenarkan dinamika politik tersendiri bagi Golkar dan berim-

plikasi pada dinamika perpolitikan Pilkada Sumut, juga memberikan ruang melakukan reinterpretasi politik. Langkah politik Nggogesa selaku Ketua Golkar, harus dapat memainkan peran strategi politik baru (pasca Cawagub) memanager politik lebih aktif lagi. Dengan kekuatan dimiliki, Golkar harus mampu mengusung partainya maju sebagai Cagub kemudian menentukan siapa Cawagub-nya.

Berdasarkan perolehan 17 kursi di DPRD sesungguhnya Golkar mendekati syarat minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara (Pasal 40/Pepu No 1/2014 tentang Pilkada). Artinya Golkar lebih mudah mendapatkan gabungannya partai politik guna memperoleh paling sedikit 20 persen kursi dimaksud. Dengan kata lain Golkar cukup hanya mendapatkan minimal 3 kursi di DPRD dari salah satu partai akan memenuhi persyaratan calon kepala daerah.

### Koalisi Golkar

Sesungguhnya tidaklah sulit bagi Golkar mendapatkan 20 persen kursi dari 100 anggota DPRD Sumut. 17 kursi dimiliki Golkar kemudian ditambah 3 kursi dari partai manapun memudahkan mengusung kadernya menjadi Cagub. Maka koalisi menjadi langkah strategis dalam pemenuhan 20 persen kursi dimaksud. Pertanyaannya, partai mana yang siap mendampingi Golkar, apalagi arus koalisi partai-partai yang ada, mudah dibaca kemana mereka berkoalisi.

Melihat arus koalisi, sebenarnya lebih memungkinkan koalisi akan terjadi mengarah kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini didasarkan kepada pikiran : (1). Dalam politik sebenarnya tidak ada koalisi permanen, PKB juga masih terbuka untuk mengikuti jejak Golkar; apalagi setiap partai memiliki platform sistem terbuka yang memungkinkan beralih koalisi kepada partai lain.

(2). Substansi koalisi saling menguntungkan satu partai dengan lainnya. Itan-saksi politik pragmatis selalu menjadi prasyarat dan harus benar-benar dirasakan oleh masing-masing partai koalisi. Jika koalisi masih pada ambiguitas, maka keretakan koalisi cukup terbuka. (3). Majunya Golkar mengusung kadernya (Cagub) menjadi daya tawar menarik kepada PKB untuk Cawagub, yang justru selama ini tidak dipikirkan bagi PKB dengan partai koalisi yang ada.

(4). PKB Sumut, meskipun memperoleh 3 kursi pada Pemilu legislatif lalu, namun tetap menjadi partai dipertanyakan. Apalagi saat ini mesin partai PKB mulai bergerak secara nasional mengusung Muthammil Iskandar sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) ke depan. Realitas ini akan turut mempengaruhi pergerakan politik PKB di Sumut. Artinya konfigurasi politik PKB hari ini berbeda dengan pergerakan pada Pemilu legislatif lalu.

Penulis adalah Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara.